



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
UNIT KERJA : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DENNY WAHYU HARYANTO
2. Jabatan : WAKIL KEPALA DINAS
3. NHK : 44562

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **2.438.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 96 m2/21 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 135 m2/180 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 1.170.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 78 m2/132 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 910.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/56 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 188.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **219.300.000**

1. MOTOR, HONDA SUPRA SEPEDA MOTOR Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 3.800.000
2. MOBIL, HONDA HONDA BRV PRESTIGE Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000
3. MOTOR, HONDA GENIO FABOULUS/SOLO Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 13.500.000
4. MOTOR, HONDA F1CO2N46LO AT /SEPEDA MOTOR Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 22.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **276.000.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp.** **---**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** **755.953.627**



F. HARTA LAINNYA

Sub Total

Rp. ----

Rp. 3.689.253.627

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 3.689.253.627

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.